

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Ketika pendudukan Jepang, supaya mudah dikontrol wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Sumatra menjadi daerah pendudukan Jepang ketujuh, bergabung dengan Singapura, markas besarnya di Singapura. Jawa dan Madura menjadi daerah pendudukan tentara Jepang yang keenam belas yang markas besarnya berada di Jakarta. Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah pendudukan Angkatan laut Jepang yang bermarkas di Makasar.<sup>1</sup>

Jepang berusaha untuk mendekati Indonesia, terutama untuk mendekati pada umat Islam, sebenarnya sudah jauh sebelum Perang Dunia II.<sup>2</sup> Dukungan umat Islam waktu itu memang sangat diperlukan oleh Jepang, guna membentuk

---

<sup>1</sup> Slamet Mulyono, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid II* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 9.

<sup>2</sup> Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat PD II) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu (Amerika, Inggris, Prancis, dll) dan Poros (Jerman, Itali, Jepang, dll). Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil. Dalam keadaan "perang total," pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai saat Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. Secara resmi PD II berakhir ketika Jepang menandatangani dokumen *Japanese Instrument of Surrender* di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, 6 tahun setelah perang dimulai; Ibnu Suwarso, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia* (Surakarta: Widya Buta, 1986), 176-177.

persemakmuran Asia Timur Raya. Selain itu memang pihak Indonesia juga membutuhkan Jepang, guna melepaskan diri dari penjajahan Belanda.<sup>3</sup> Hal ini terlihat pada tahun 1935 di Kobe, Jepang, telah dibangun sebuah masjid untuk pertama kalinya. Selain itu Jepang juga banyak mengirimkan beberapa pelajarnya untuk mempelajari Islam di Timur Tengah, bahkan akhirnya Jepang banyak mendatangkan guru-guru Islam dari Timur Tengah dan Asia. Tujuannya adalah untuk menarik simpati golongan Muslim di Asia bahwa Jepang merupakan salah satu negara Islam. Tak cukup dengan itu, di Jepang pada Mei 1938 muncul perserikatan Islam Jepang yang bernama *Nippon Kiakyo Kyokai* yang dipimpin oleh Senjuro Hayashi (bapak Islam Jepang).<sup>4</sup> Pada tanggal 5-29 November 1938, langkah awal organisasi ini dimulai dengan mengadakan pameran di Tokyo dan Osaka. Indonesia merupakan salah satu negara yang diundang dan memberikan respon positif kepada pemerintahan Jepang. MIAI<sup>5</sup> adalah organisasi yang menerima dan menyetujui adanya undangan tersebut.

---

<sup>3</sup> Khairun Nisa', *Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan Indonesia 1942-1945* (Skripsi, UIN Su-Ka, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta, 2010), 1-2.

<sup>4</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 134.

<sup>5</sup> MIAI (Majelis Islam A'la Indoneis) adalah sebuah dewan Islam tertinggi Indonesia yang diprakarsai oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Majelis ini dibentuk di Surabaya pada tanggal 21 September 1937 lantaran kesadaran yang mendalam akan pentingnya memperbaiki komunikasi antara partai-partai dan organisasi yang berasaskan Islam. Dilatar belakangi dengan kebijakan Belanda yang membentuk Undang-undang perkawinan pada tahun 1937. Undang-undang tersebut dianggap oleh umat Islam bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah yang mewakili umat Islam berinisiatif mendirikan MIAI.

Tokoh MIAI yang mewakili undangan dari Jepang diantaranya adalah: Farid Ma'ruf, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasmal (dari Muhammadiyah). Abdullah Alamudi (dari PAI), dan Ahmad Sidiq (dari NU); Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Bekerja Sama dengan Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan* (Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010), 110.

Jepang telah berhasil menyelenggarakan pameran Islam dan antusias orang Islam sangat tinggi. Maka Profesor T. Kanaya setelah adanya pameran Islam dan kongres tersebut diberangkatkan ke Hindia Belanda<sup>6</sup> dengan tujuan memperkuat ikatan dengan orang Islam di Indonesia. Namun hal itu sulit, karena pengawalan dari Belanda sangat ketat.<sup>7</sup>

Pada pertengahan Perang Dunia ke-II, sudah terlihat kemenangan dari pihak pasukan Sekutu<sup>8</sup>. Dari situ, sebagai lawan dari Sekutu, Jepang membutuhkan dukungan dari negara-negara tetangganya, salah satunya adalah Negara Indonesia. Cara yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia adalah dengan menarik simpati masyarakat pribumi bahwa Indonesia adalah saudara tua Jepang<sup>9</sup> dan Jepang juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan tugas dari Tenno Heika<sup>10</sup> untuk membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Hindia Belanda merupakan sebutan dari daerah kekuasaan penjajahan Belanda yang berada di Samudra Hindia, termasuk Indonesia.

<sup>7</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 134.

<sup>8</sup> Sekutu adalah: sekelompok negara yang beranggotakan Inggris, Prancis, Rusia, ditambah Amerika. Mereka melawan Jerman, Itali, dan Jepang pada masa Perang Dunia II pada kisaran tahun 1939-1945. Dijelaskan dalam, Musyirifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 34.

<sup>9</sup> Saudara tua karena Indonesia dianggap sebagai bangsa yang sama-sama dari Asia. Selain itu Jepang juga memproklamasikan dengan semboyan 3A, yaitu Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Politik Islam Jepang sebelum Perang Dunia II juga menjadikan Jepang dan Indonesia lebih akrab.

<sup>10</sup> *Tenno Heika* adalah raja Jepang pada masa itu, yang dianggap sebagai keturunan dari dewa matahari.

<sup>11</sup> Shir Liy Azzuhnah, *Peranan Muslim Masa Pedudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 2001). 3

Usaha Jepang pun akhirnya membawakan hasil. Terbukti bahwa kedatangan bala tentara Jepang di Sumatra untuk pertama kalinya di daerah Palembang, pada tanggal 14 Februari 1942 disambut baik oleh masyarakat Sumatra, Tiga minggu sebelum pendaratannya di Jawa. Karena dianggap menjadi saudara tua Asia dan menjadi pembebas dari para penjajah (*Imperialis*).<sup>12</sup> Selanjutnya, usaha Jepang untuk bisa menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sekutunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam politik pemerintahan, adapun kontrol tetap dari Jepang. Hal ini dirasa sangat tepat karena pada masa penjajahan Belanda keikutsertaan dalam politik sangatlah sempit.

Sejak awal tahun 1942, Jepang berusaha untuk memobilisasi Islam Indonesia pada tingkat rakyat pedesaan, guna mendapatkan dukungan atas pendudukannya. Saat itu politik Jepang terhadap Islam tampil kedepan sebagai upaya untuk memulai usahanya menguasai orang-orang Islam di Jawa. Kaum Muslim menduduki bagian yang tidak dapat diremehkan dalam badan pemerintahan<sup>13</sup> baru yang diciptakan oleh pemerintah pendudukan Jepang.<sup>14</sup>

Jepang berencana membuat sebuah badan pemerintahan untuk orang-orang Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak bulan Agustus 1942, yaitu adanya usaha

---

<sup>12</sup> Slamet Mulyono, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid II*, 1.

<sup>13</sup> Badan pemerintahan yang dibuat oleh Jepang untuk umat Islam pada awal kedudukannya pada tahun 1942 adalah membentuk *Shumubu* (semacam Departemen Agama pusat) dan *Shumuka* (semacam Departemen Agama Karisedenan). Selain itu, untuk mengisi kekosongan dari kursi kepemimpinan orang-orang Hindia-Belanda di daerah-daerah Karisedenan yang telah menyerah tanpa syarat, maka banyak juga dari kalangan Islam yang diangkat untuk menggantikan posisi mereka.

<sup>14</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 165.

pemerintah militer Jepang yang meningkat, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 (tentang aturan pemerintah daerah) dan Undang-Undang No. 28 (tentang aturan pemerintah *syu* dan *Tokubetsu Syi*, yang menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara).<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang No. 27 (tentang perubahan pemerintah daerah) seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi atas *Syu*, *Syi*, *Ken*, *Gun*, *Son*, dan *Ku*, kecuali kedua *Koci*<sup>16</sup> yaitu Surakarta dan Yogyakarta,

1. *Syu* = Karisedenan yang terdiri atas *Syi* dan *Ken*.
2. *Syi* = *Stadsgemeente* (Kotapraja), Kepala *Syi*: *Syico*
3. *Ken* = Kabupaten, Kepala *Ken* : *Kenco*
4. *Gun* = *District* (Kawedanan), Kepala *Gun* : *Gunco*
5. *Son* = *Onderdistrict* (Kecamatan), Kepala *Son* : *Sonco*
6. *Ku* = Kelurahan, Kepala *Ku* : *Kuco*.<sup>17</sup>

Setelah Jepang membentuk badan pemerintahan ini, *ofensif*<sup>18</sup> Sekutu<sup>19</sup> semakin melemahkan Angkatan Militer Jepang yang mengakibatkan diperlukannya tenaga-tenaga bangsa Indonesia. Guna mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat Indonesia, Jepang mengubah sikap politiknya terhadap negara-negara yang didudukinya. Di depan Sidang Istimewa Parlemen ke-28 di Tokyo, Perdana

---

<sup>15</sup> Marwati Djuned Puspongoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 19.

<sup>16</sup> *Koci* adalah daerah istimewa, meliputi Kerajaan Jogjakarta dan Kerajaan Surakarta.

<sup>17</sup> Marwati Djuned Puspongoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*, 19.

<sup>18</sup> *Ofensif* berarti serangan atau menyerang.

<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan sekutu disini adalah pasukan Amerika yang dibantu oleh tentara Australia untuk menyerang dan merebut daerah kekuasaan Jepang yang berada di wilayah Pasifik, tepatnya berada di daerah Mariana, pulau Truk.

Mentri Tojo dalam pidatonya pada tanggal 16 Juni 1943 tentang keputusan pemerintah mengenai pemberian kesempatan kepada Indonesia untuk “turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara”. Menyusul pula pada tanggal 1 Agustus 1943 pengumuman *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi Militer) tentang garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan negara yang dijanjikan itu, yakni meliputi pembentukan badan-badan pertimbangan di daerah dan di pusat pemerintahan serta jabatan-jabatan tinggi untuk orang-orang Indonesia sebagai penasehat pada pemerintahan militer.<sup>20</sup> Disisi lain Jepang juga menyemarakkan Anti-Barat, Asia untuk bangsa Asia.<sup>21</sup>

Jepang berencana memberi kemerdekaan kepada Burma (Myanmar) dan Filipina terdengar oleh Indonesia. Namun sayangnya rencana itu tidak menyebut nasib Indonesia. Oleh karena itu, Ir. Sukarno dan Moh. Hatta mengajukan protes kepada Jepang. Untuk menanggapi protes dan ancaman dari tokoh-tokoh Indonesia, pemerintah Jepang kemudian segera memberikan beberapa kebijakan politik untuk Indonesia, diantaranya adalah: Pembentukan Dewan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*), Dewan Pertimbangan Keresidenan (*Shu Shangi Kai*), Tokoh-tokoh Indonesia diangkat sebagai penasihat di berbagai departemen, dan pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

---

<sup>20</sup> Marwati Djuned Pusponogoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*, 22-23.

<sup>21</sup> Dasman Djamaluddin, *Jendral TNI Anumerta Basuki Rachmat & Supersemar* (Jakarta: Grasindo, 2008), 6.

Orang-orang Indonesia diangkat pada kedudukan tertinggi dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr. Husein Jajaningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943 Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio diangkat menjadi *Syucokan* Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasehat bangsa Indonesia pada pemerintahan militer telah dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut *Sanyo* yang dipilih untuk enam macam *Bu* (Departemen): Ir. Sukarno untuk *Somubu* (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rasyid untuk *Naimunu-bunkyoku* (Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri), Prof. Dr. Mr. Supomo untuk *Shihobu* (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), Mr. Muh. Yamin untuk *Sdendenbu* (Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo untuk *Sangyobu* (Departemen Ekonomi).<sup>22</sup>

Sedangkan *Chuo Sangi-in* atau yang biasa disebut dengan Badan Penasehat Pusat, didirikan pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Jendral Tojo, Perdana Menteri Jepang.<sup>23</sup> *Chuo Sangi-in* atau Badan Penasehat Pusat adalah suatu badan yang tugasnya menjawab usul dari *Saikho Sikikan* yang berkaitan dengan mempersiapkan masyarakat Jawa dan Madura<sup>24</sup> untuk ikut andil dalam Perang Asia Timur Raya,

---

<sup>22</sup> Marwati Djuned Puspongoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*. 22-23.

<sup>23</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II* (Jakarta: Grasindo), 138.

<sup>24</sup> Peneliti tidak menyebutkan bahwa Badan Penasehat Pusat untuk mengontrol masyarakat Indonesia, tetapi Badan Penasehat Pusat atau dalam bahasa Jepangnya *Chuo Sangi-in* dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mengatur masyarakat Indonesia yang berada di Jawa dan Madura. Karena

kemudian merapatkan dan hasilnya direalisasikan kepada masyarakat Jawa dan Madura guna kepentingan Perang Asia Timur Raya. Dua puluh tiga orang anggotanya diangkat oleh *Saiko Shikikan*, sedangkan delapan belas lainnya merupakan utusan dari tiap *Syu*, serta dua orang utusan dari Yogyakarta dan Surakarta atau *Koci*. Dengan demikian jumlah seluruh anggotanya adalah empat puluh tiga orang. Pada Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* ini, Ir. Sukarno secara resmi diangkat sebagai ketua, sedangkan R.M.A.A. Kusumo Utojo dan Dr. Butaran Martoatmodjo masing-masing sebagai wakil ketua.<sup>25</sup> Pelantikan dilakukan oleh *Zimukyokuchō*.<sup>26</sup>

Dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, Jepang mengangkat 6 anggota yang berasal dari kalangan tokoh Muslim<sup>27</sup> dan mereka lebih bebas berekspresi jika dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda. Keberadaan mereka merupakan kunci utama untuk bisa melegitimasi umat Muslim di Jawa dan Madura guna membantu Jepang dan menuju kemerdekaan Indonesia. Adanya tokoh-tokoh Islam dalam Badan Penasehat Pusat memberikan kemudahan terhadap organisasi Islam

---

masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga kekuasaan atau pemerintahan untuk mempermudah mengontrol dan mengatur masyarakat Indonesia. pembagian dalam tiga pemerintahan itu bisa dilihat pada bab satu bagian pendahuluan, paragraf pertama.

<sup>25</sup> Marwati Djuned Pusponogoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*, 23.

<sup>26</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II*, 138.

<sup>27</sup> Keenam anggota Muslim adalah empat diantaranya langsung diangkat oleh *Saiko Shikikan* yaitu K. H. Wahid Hasyim, Mas Mansur, Bagus Hadikusumo, K. H. A. Halim, sedangkan dua lainnya adalah perwakilan dari *Syu* atau *Karisedenan* yaitu K. H. Fatchurrahman, dan K. H. A. Mukti, menurut Surat Kabar Djawa Baru pada tahun 1943. Sedangkan dalam; Arniati Prasedyawati herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya Putra). Diantara golongan Islam yang berada dalam Badan Penasehat Pusat / *Chuo Sangi-in*. Empat diantaranya langsung dipilih oleh *Saiko Shikikan* adalah K.H. Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, dan dua diantaranya yang mewakili *Syu* adalah R.H. Fatchuracman, dan Ir.M.A. Sofwan.



seperti NU, Muhammadiyah, Perserikatan Ulama untuk aktif kembali dan organisasi Islam lama (MIAI) yang kemudian diganti dengan Masyumi. Selain itu, Untuk menghadapi sekutu, usulan dari kalangan Muslim untuk membentuk sebuah angkatan militer Islam diperbolehkan, seperti Hizbullah. Kemudian, guna memudahkan legitimasi terhadap kalangan Islam, maka ketua *Shumubu* diberikan kepada tokoh Muslim dan mendirikan *Shumuka* di setiap karisedenan dengan dikepalai oleh orang-orang Islam.

Bertumpu pada besarnya andil tokoh Muslim Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Maka skripsi ini diberi judul “Peran Tokoh Muslim Dalam Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) Menuju Kemerdekaan Indonesia Tahun 1943-1945”. Muslim yang dimaksud oleh Peneliti dalam skripsi ini adalah Muslim yang berada di Jawa dan Madura dan untuk rentan waktunya hanya sampai pada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Waktu itu peranan tokoh Muslim tidak begitu terlihat dalam sejarah pergerakan Nasional. Maka peneliti ingin mendiskripsikan bahwa tokoh Muslim mempunyai andil yang besar dalam menentukan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil peran empat tokoh Muslim dari enam tokoh Muslim yang ada dalam Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in*, yaitu empat tokoh yang dipilih langsung oleh pemerintah Jepang. Sedangkan kedua tokoh lainnya tidak diikutkan dalam pembahasan, karena mereka hanya perwakilan dari *Syu*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakan Sejarah masuknya Jepang dan politik awal Jepang di Indonesia?
2. Bagaimana Sejarah berdirinya Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*)?
3. Bagaimana peran tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) dan apakah hasil yang dicapai oleh tokoh Muslim atas keikut sertaannya sebagai anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) untuk menuju kemerdekaan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui politik Jepang terhadap Indonesia pada umumnya dan politik Jepang terhadap Islam Indonesia khususnya.
2. Dapat mengetahui peran tokoh Muslim sebagai bagian dari anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk membantu Jepang melawan sekutu dan mencapai kemerdekaan Indonesia.
3. Mengetahui hasil yang dapat di capai oleh tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk menuju kemerdekaan Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat memaparkan fakta-fakta sejarah, dengan harapan agar pembaca dapat memahami dan mengetahui tentang peran tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama bidang kesejarahan.

3. Dapat dijadikan bahan referensi di Perpustakaan Fakultas Adab, maupun perpustakaan pusat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam bidang kajian Islam Indonesia masa Pendudukan Jepang.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan mengenai kekhasan penelitian yang hendak dikerjakan. Dan untuk mengetahui sejauh mana keaslian data yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagai satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan peneliti yang lain. Adapun penelitian tersebut diantaranya berupa buku, diantaranya:

1. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian Pertama, “Warisan Kolonial” yang terdiri dari “tiga bab”, merupakan uraian situasi Indonesia, khususnya umat Islam, pada masa-masa terakhir kekuasaan Belanda. Bagian Kedua, “Pendudukan Jepang” yang terdiri dari “lima bab”. Pada bagian pertama dijelaskan tentang varian masyarakat Jawa menurut Clifford Gertz yaitu santri, priyai, dan abangan. Setelah itu Benda menjelaskan tentang politik Belanda terhadap Islam oleh Christiaan Snouck Hurgronje.

Inti pembahasan dalam buku ini adalah pada bagian ke dua, yaitu tentang kependudukan Jepang. Dimulai dari masuknya Jepang ke Indonesia dan melakukan ekspansi keseluruhan wilayah di Indonesia. pada masa Jepang ini peran Islam sangat tinggi, tujuannya adalah untuk melegitimasi masyarakat

Muslim (sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia) untuk bisa membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya untuk melwan Sekutu. Hal ini terbuti dengan adanya badan pemerintahan Islam yang dibentuk oleh Jepang seperti *Shumubu* diawal pendudukanya dan memperbolehkan organisasi-organisasi Islam untuk muncul kembali diakhir pendudukan Jepang. Selain itu para tokoh Muslim lebih bebas berekspresi untuk mengatur umatnya. guna mempermudah menggerakkan masyarakat Islam untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan usaha untuk kemerdekaan.

Jepang lebih terlihat memberikan kebebasan terhadap umat Islam pada masa akhir perang Duni Dua. Jepang sebagai pihak yang bertahan sangat membutuhkan bantuan dari kalangan umat Islam, maka beberapa kebijakan untuk umat Islam lebih diperbanyak, seperti mengganti MIAI dengan Masyumi, lebih banyak menempatkan tokoh Islam dalam badan pemerintahan jikan dibandingkan pada masa Belanda, membentuk tentara Muslim Hizbullah.

Dan berupa tugas akhir atau Skripsi yang di tulis oleh mahasiswa sebelumnya, yakni;

1. Shir Liy Azzunah, *Peranan Muslim masa pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945* (Skripsi: fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, IAIN Sunan Ampel, 2011).

Dalam skripsi ini, bab pertama berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, pendekatan dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab dua membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, bab tiga membahas tentang kondisi Indonesia selama pendudukan Jepang, bab empat membahas tentang reaksi Muslim dan seputar tahun 1945, dan bab lima penutup.

Didalam karya ini dijelaskan bagaimana politik Jepang yang digunakan sebagai legitimasi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia adalah dengan memegang orang-orang penting dalam Islam. Hal ini dianggap bahwa mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia akan ikut dan patuh atas apa yang di fatwakan oleh pemimpin, kyai atau umala' Islam. Sehingga Jepang memegang dan meletakkan para pemimpin, kiyai dan ulama' pada posisi yang atas dalam kancah politik.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan di atas, belum ada yang memaparkan tentang apa dan bagaimana peran Tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang dibuat oleh Jepang, Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji tema di atas tersebut. Jika dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya pada peristiwa yang global pada masa penjajahan Jepang. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada peranan Muslim secara khusus, hal ini dikarenakan perlu adanya beberapa penafsiran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kemerdekaan Indonesia dengan mencari pengaruh secara spesifik.

## F. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan sejarah yang di dalamnya terdapat eksplanasi kritis dan kedalaman pengetahuan tentang “bagaimana” dan “mengapa” peristiwa-peristiwa masa lampau bisa terjadi. Sehingga nantinya akan di dapat fakta-fakta sejarah tentang peran tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang dibuat oleh Jepang untuk mengontrol masyarakat Muslim Jawa dan Madura.

Pendekatan politik berfungsi untuk mengungkapkan peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1943-1945, khususnya yang diperjuangkan oleh tokoh Muslim Indonesia dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Dalam karya penelitian ini, penulis akan memaparkan bentuk usaha dan perjuangan yang dilakukan tokoh Muslim Indonesia dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari peranannya menjadi anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Untuk kerangka teoritiknya penulis sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Talcott Parson melalui pendekatan fungsionalisme-struktural.

Struktur sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial memiliki peran atau fungsi yang berbeda-beda sesuai posisinya masing-masing.<sup>28</sup> Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem.

---

<sup>28</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 21. Diterjemahkan oleh Drs. Alimandan dari judul aslinya; *Sociology: A Multiple Paradigm Science*.

Sedangkan sistem sendiri adalah satu kesatuan masyarakat sosial. Untuk menjalankan sebuah sistem, menurut Talcott Parson, maka dibutuhkan empat fungsi guna memperlancar jalanya sistem tersebut atau yang biasa disebut dengan fungsi AGIL. Diantaranya adalah:

1. *Adaptasi*, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya,
2. *Pencapaian tujuan*, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan bersamanya yang diutamakan,
3. *Integrasi*, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya,
4. *Latensi (pemeliharaan pola)*, sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.<sup>29</sup>

Empat fungsi diatas dalam sistem sosial memang sangat di butuhkan guna untuk mencapai *equilibrium* atau keseimbangan sosial. Masyarakat tersusun dalam sebuah struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda. Perbedaan fungsi itu akan menempatkan mereka sesuai dengan posisi masing-masing individu dalam struktur sistem tersebut. Memang dalam teori ini, seperti orang-orang bawahan atau pemeran

---

<sup>29</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi; Dasar teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012). 256-257. Diterjemahkan oleh Nurhdi . Terjemahan dari buku: *Sociological Theory*, karya : George Ritzer dan Douglas J. Goodman, (New York: McGraw-Hill, 2004).

fungsi bawah, orang tertindas juga diperlukan untuk memperlancar jalannya sistem tersebut.

Nantinya dalam penulisan karya ini akan dijelaskan bagaimana pihak Jepang memberikan peran politik kepada para Tokoh Islam Indonesia yang berada di Jawa dan Madura dengan dibentuknya sebuah Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Dengan memberikan peran ini, para tokoh Islam akan berfungsi sebagai penggerak masyarakat Muslim untuk bisa memberikan kontribusinya terhadap perang Asia Timur Raya dan juga untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwasanya Jepang banyak melibatkan para kiai dan tokoh Muslim untuk berperan aktif dalam lembaga yang dinaunginya. Tujuannya agar Jepang dapat memobilisasi rakyat Jawa dan Madura yang mayoritas Muslim dengan mudah.

Dengan adanya Badan Penasehat Pusat atau yang bisa disebut dengan *Chuo Sangi-in* (dalam bahasa Jepang), para tokoh Islam dalam kebijakannya adalah memberikan fungsi-fungsi terhadap masyarakat Jawa dan Madura khususnya masyarakat Islam, guna ikut berkontribusi dalam setiap hal yang bertujuan untuk membantu Jepang melawan Sekutu dalam perang Asia Timur Raya dan mempersiapkan menuju kemerdekaan bagi Indonesia. Para pemimpin-pemimpin dari golongan Islam ini mudah menjalankan sistem dalam suatu struktur pemerintahan sesuai dengan fungsinya, karena sebelumnya masyarakat adalah pengikutnya. Dengan fungsi itu, masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Seperti contoh, dengan adanya tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, mereka lebih diberikan kebebasan mengatur umatnya



untuk tujuan perang Asia Timur Raya dan persiapan kemerdekaan. Seperti membentuk Masyumi, Hizbullah, mengaktifkan kembali Nahdlotul Ulama', muhammadiyah, dan lain-lain.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan sejarah, yakni ;

1. *Heuristik*, adalah berasal dari bahasa Yunani *heurishein* yang artinya memperoleh, secara terminologi adalah suatu teknik, suatu seni mencari sumber dalam penelitian sejarah.<sup>30</sup> Diharapkan sejarawan sebagai peneliti mencari sumber yang utama yang berkaitan dengan penelitian yang diadakan.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan berdasar judul di atas.

Adapun sumber yang digunakan, yakni:

- a. *Sumber Primer* adalah sumber yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah<sup>32</sup>, dalam karya ini peneliti menggunakan sumber dokumen audio visual, surat kabar, dan koran yang terbit pada tahun 1943-1945, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* dan Peran tokoh Muslim didalamnya. Adapun nama surat kabar dan koran yang digunakan sebagai sumber adalah :

---

<sup>30</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 55.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 65.

1. *Kan Po* (Berita Pemerintah), tahun 2604 Showa<sup>33</sup> (1944 M).
2. Surat kabar: Almanak Asia Raja, tahun 2604 Showa (1944 M).
3. Surat kabar: Djawa Baru, tahun 2603-2605 Showa (1943-1945 M).
4. Surat kabar: Suara Muslimin Indonesia, tahun 2605 Showa (1945 M).
5. Tjatatatan Tulisan Tjepat dalam Sidang Tyuoo Sangi-in Jang kedua, tahun 1944.
6. Koran: Tjahaja, tahun 1944.

b. *Sumber Sekunder* adalah sumber yang dihasilkan oleh orang yang tidak terlibat atau menyaksikan secara langsung peristiwa yang ditulis.<sup>34</sup> Hal ini biasanya berbentuk buku, buku tersebut di antaranya adalah

1. M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2008).
2. Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, jilid II* (Yogyakarta: LKIS, 2008).
3. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

2. *Kritik Sumber*, upaya untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber. Adapun caranya yaitu dengan melakukan kritik. Yang dimaksud adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan

---

<sup>33</sup> *Showa* adalah tahun dalam pertanggalan Jepang.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 24.

objektivitas suatu kejadian.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran.

Adapun kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Kritik intern*: kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, dikecohkan, dan lain-lain. Kritik intern guna untuk memahami teks. Pemahaman isi teks diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya.<sup>36</sup>

Pada kritik intern ini, bahwa isi dari Audio visual, surat kabar, dan koran menjelaskan tentang peristiwa pada tahun 1943-1945 yang berkaitan dengan peran tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, yang salah satu isinya adalah pidato dan pernyataan tokoh Islam yang menjadi salah satu anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, yang berupa persiapan menuju kemerdekaan.

Dari sumber diatas, peneliti telah mengklarifikasi sumber dengan cara membandingkan isi dari sumber tersebut dengan sumber data yang lain. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah sumber yang telah didapatkan oleh peneliti dapat memberikan informasi yang akurat tentang peristiwa yang berkaitan dengan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Hal ini bisa dilihat pada kesesuaian isi sumber data yang ada dengan yang didapatkan oleh peneliti, seperti disebutkan di atas.

---

<sup>35</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Surabaya: Graha Ilmu, 2010), 35.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 37.

Setelah peneliti membandingkan sumberdata satu dengan yang lainnya, ternyata sumber-sumber primer seperti yang sudah disebutkan diatas adalah sumber yang isinya dapat dipastikan kebenarannya. Karena dalam isinya, peneliti tidak menemukan kandungan atau dialektika pembahasan yang penulisannya mengarah pada subjektivitas atau kepentingan tertentu. Maksudnya adalah bahwa dalam penulisan sumber tersebut, materi yang ditulis memang benar-benar terjadi dan tidak dikesampingkan.

- b. *Kritik ekstern*: usaha mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber sejarah yang mengarah pada aspek luar sumber. Otentitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Jenis-jenis dari materi sumber, ketikan dokumen atau arsip, jenis kertas, ukuran, bahan, kualitas, dan lain-lain. Ditulis tangan atau diketik, ataukah komputer, demikian pula jenis tinta yang dipakai.<sup>37</sup>

Dalam karya penelitian ini, sumber audio visual dan surat kabar Djawa Baru terdapat di ANRI Nasional, sedangkan Surat Kabar dan koran yang lainnya didapatkan di Perpustakaan Nasional. Bentuk fisik dari surat kabar dan koran yang saya dapatkan untuk penelitian ini adalah hasil fotokopi dari teks asli, karena yang asli sudah disimpan dan ditakutkan akan terjadi kerusakan ketika penelitian berlangsung, yang akhirnya merusak sumber asli. Pada sumber ini, tulisan yang ada sudah merupakan sebuah tulisan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 36.

yang berupa ketikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesesuaian bentuk kata dan kerapian susunan tulisan.

3. *Interpretasi*, satu upaya yang dilakukan sejarawan untuk memperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya satu peristiwa.<sup>38</sup> Oleh karenanya interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama.

Dalam fase ini, peneliti akan menginterpretasikan atau menafsirkan fenomena yang sudah diteliti tentang peran tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk usaha menuju kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah terkumpul dan memberikan perbandingan atas sumber yang sudah ada. Penafsiran ini akan terasa sulit, karena adanya keterbatasan sumber dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang peristiwa ini. Maka dari itu peneliti harus pandai memberikan penafsiran yang seimbang sehingga hasil yang dicapai nantinya adalah sebuah hasil penelitian yang Objektif.

4. *Historiografi*, adalah cara pelaporan, pemaparan, atas penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulis hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian sejak dari awal hingga akhir.

Setelah melakukan interpretasi, peneliti berada pada tahap yang terakhir dalam karya penelitian ini, yaitu pada tahap penulisan sejarah tentang Peran Tokoh

---

<sup>38</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 65.

Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk menuju kemerdekaan Indonesia berdasarkan sumber yang telah dimilikinya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian karya ini disusun dalam tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub. Hal ini bertujuan supaya pembahasan mudah difahami dengan sesuai bab yang tersedia. adapun bab-bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah,
- B. Rumusan Masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. Kegunaan Penelitian,
- E. Penelitian Terdahulu,
- F. Pendekatan dan Kerangka Teoritik,
- G. Metode Penelitian, dan
- H. Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pendudukan Jepang di Indonesia, yang dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu:

- A. Membahas masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia.

- B. Kebijakan awal Jepang terhadap Indonesia untuk mencari pengaruh masyarakat Indonesia.

BAB III : Pada bab ini akan dibagi menjadi dua yang menjelaskan tentang:

- A. Sejarah terbentuknya badan *Chuo Sangi-in* atau yang biasa disebut Badan Penasehat Pusat.
- B. Biografi anggota tokoh muslim dalam Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*)

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang memuat hasil penelitian, yang berisi tentang:

- A. Peran tokoh Muslim dalam persidangan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*.
- B. Kontribusi yang dihasilkan dari peranannya tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

BAB V: Bab kelima merupakan bagian terakhir atau penutup dari penelitian ini.

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.